



Media: Republika

Hari: Rabu

Tanggal: 25 Mei 2016

Halaman: 22

Dilakukan Penyisiran Data PBI BJPS

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan segera menyisir data kepesertaan penerima bantuan iur (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Langkah ini merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama antara pemkot dan BPJS.

"Akan dilakukan penyisiran data oleh petugas sosial untuk mengetahui apakah masih ada penduduk miskin yang belum masuk sebagai penerima bantuan iur atau tidak," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Selasa (24/5).

PBI ini merupakan peserta jaminan kesehatan dari warga fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pemerintah akan menanggung pembayaran iur peserta tersebut. Menurut Haryadi, nantinya hasil penyisiran data PBI ini akan dijadikan sebagai dasar untuk menyinkronkan program jaminan kesehatan daerah dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Selain itu, Haryadi meminta BPJS Kesehatan, selaku instansi yang menjalankan program JKN, bisa terus menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai jaminan kesehatan ini. Khususnya juga terkait tata cara pembayaran iuran setiap bulan.

"Jangan sampai setelah masyarakat terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, mereka tidak mengetahui cara pembayaran iurannya, atau bahkan tidak tahu bahwa mereka memiliki kewajiban membayar iuran setiap bulan," ujar dia.

Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Yogyakarta Upik Handayani menjelaskan, saat ini total kepesertaan JKN di wilayah Kota Yogyakarta sudah mencapai 84,34 persen. Persentase Kota Yogyakarta ini menjadi yang tertinggi dibandingkan daerah lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tingkat kepesertaannya rata-rata mencapai 74 persen. Menurut dia, jumlah peserta BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 344.121 peserta.

Sedangkan untuk PBI, Upik mengatakan, Kota Yogyakarta memiliki kuota 111.647 peserta. Ia mengatakan, data tersebut dari pusat, sehingga perlu dilakukan verifikasi kembali. Verifikasi dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta. "Dimungkinkan ada perubahan data karena warga meninggal dunia atau sudah terdaftar sebagai peserta mandiri," kata dia.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Hadi Muchtar mengatakan, proses verifikasi data kepesertaan PBI akan dilakukan secara rutin tiap Juli dan Januari. Hasil verifikasi itu dilaporkan ke Pemerintah DIY. Jika ditemukan ada perubahan data, ia mengatakan, dinas akan mengusulkan penggantian penerima. "Misalnya saja, dari anggota keluarga terdekat atau dari penduduk miskin penerima kartu menuju sejahtera (KMS) yang belum masuk sebagai peserta," ujar dia. katanya.

■ antara edisi tiran fitur

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005